

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perikanan
2. Mendorong Dinas Perikanan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perikanan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah (BUPATI) atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perikanan selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan dan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya

C. Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumberdaya manusia nelayan yang terampil dalam mengoperasikan alat tangkap sehingga pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap belum bisa berfungsi secara maksimal.
- b. Kurangnya alokasi APBD untuk Dinas Perikanan yang berakibat padaminimnya program prioritas yang dapat dilaksanakan karena anggaran APBD sebagian besar digunakan untuk mendukung hal-hal yang bersifat operasional.
- c. Kurangnya alokasi APBD untuk pendidikan pelatihan tenaga terampil bagi pegawai yang ada khususnya pelatihan yang berkaitan langsung dengan pengembangan perikanan.

D. Struktur Organisasi

Pada Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dalam mengemban tugasnya dibantu:

- i. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan.
- ii. Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - b. Seksi Pengolahan Sumberdaya Ikan;
 - c. Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan
- iii. Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
 - b. Seksi Produksi dan Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia
- iv. Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Sumberaya Kelautan dan Perikanan
- b. Seksi Bina Mutu dan Diverifikasi Produk
- c. Seksi Pengelolaan Ruang Laut

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

E. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

F. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Perikanan seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara tersebut adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikanan. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan
- b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perizinan dibidang Perikanan
- c. Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

G. Kondisi Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara menurut kepangkatandapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai menurut Kepangkatan

Golongan	Jumlah (orang)
<i>1</i>	2
Golongan I	-
Golongan II	2
Golongan III	22
Golongan IV	4
JUMLAH	28

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari:

Tabel 1.2
Jabatan berdasarkan pendidikan

JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
<i>1</i>	<i>2</i>
Kepala Dinas	S2
Sekretaris	S2
Kepala Bidang Perikanan Tangkap	S2
Kepala Bidang Perikanan Budidaya	S1
Kepala Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing	S2
Kepala seksi Pengembangan SDM	S1
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan	S1
Kepala Seksi Bina Mutu dn diversifikasi Produk	S1
Kepala Seksi Produksi dan Usaha	S2
Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	S1
Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Perlengkapan	S2
Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya	S1
Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	S1
Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan	S2
Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut	S1
Kepala Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan	S1

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara menurut Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (orang)
<i>1</i>	<i>2</i>
SLTA	1
D-III	1
S-1	19
S-2	7
JUMLAH	28

H. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara, yaitu sarana, dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Dinas Perikanan T.A. 2019

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Gedung Kantor Perikanan	1	unit	Baik
2	Mobil	2	unit	Baik
3	Motor	18	unit	Baik
4	Tempat Pelelangan Ikan	1	unit	Baik
5	Lap top	10	unit	Baik
6	Komputer PC	2	unit	Baik
7	Printer	6	unit	Baik
8	Alat selam	1	unit	Baik
9	Kamera bawah air	1	Unit	Baik

Jika dilihat dari jumlah dengan kebutuhan ideal, maka di Dinas perikanan dari segi kuantitas terhadap spesifikasi dan jumlah barangnya masih sangat jauh tertinggal. Demikian halnya dengan sarana pendukung operasional, banyak kendaraan yang berusia diatas Empat tahun, yang tentunya akan memerlukan biaya perawatan yang tinggi.

I. Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 7.289.790.800,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.952.118.800,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Delapan Belas Ribu Delapan ratus Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.337.672.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan persentase belanja tidak langsung dari total anggaran sebesar 98% dan persentase belanja langsung dari total anggaran sebesar 93.55%.

J. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara, Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2016-2021, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Visi RPJMD Kabupaten Buton Utara, yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera”. Misi RPJMD yang berhubungan dengan bidang Perikanan yaitu Misi ke-4 “*Meningkatkan dan Mendorong tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumberdaya Lokal secara berkelanjutan*”. Tujuan RPJMD Kabupaten Buton Utara yang berhubungan dengan misi ke-4 tersebut adalah “Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil produksi ekonomi kerakyatan”, dengan sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dari sektor-sektor ekonomi kerakyatan”.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka Dinas Perikanan merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2.1
Visi, misi, tujuan, sasaran RPJMD dan Dinas Perikanan

Visi RPJMD	<i>Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara</i>	Visi OPD	<i>Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera</i>
Misi RPJMD	<i>Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan</i>	Misi OPD	<i>Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan</i>
Tujuan RPJMD	<i>Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil produksi ekonomi kerakyatan</i>	Tujuan OPD	<i>Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil produksi Perikanan</i>
Sasaran RPJMD	<i>Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor ekonomikerakyatan</i>	Sasaran Strategis OPD	<i>Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor Perikanan</i>

Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan 2016 - 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Renstra					Kondisi Akhir Periode Renstra
					2019	2019	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dari sektor-sektor Perikanan	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	%	51	75	79	80	85	90	90
		Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	56	67	70	72	80	87	87
		Perentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	51	78	85	90	95	100	100
		Persentase Jumlah Konsumsi Ikan	%	65	70	75	80	85	90	90
		Nilai Tukar Nelayan		0	0	101	103	104	105	105

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan uraian sebagai berikut.

1. Misi :

Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan.

2. Strategi :

Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor perikanan.

3. Kebijakan :

- Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
- Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya
- Meningkatkan Jumlah Konsumsi Ikan
- Meningkatkan Nilai Tukar Nelayan
- Meningkatkan rasio luas kawasan Budidaya

4. Program :

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- Program Pengembangan Perikanan Budidaya;
- Program Peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat;
- Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan;
- Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

5. Kegiatan :

- Pengembangan sarana perikanan tangkap;
- Pengembangan sarana perikanan tangkap (DAK);
- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap;
- Pembangunan pelelangan ikan;
- Pembangunan pelabuhan perikanan;
- Pengembangan sarana peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya;
- Pengembangan bibit unggul;
- Pembinaan POKMASWAS;
- Penyuluhan budaya kelautan;
- Sosialisasi penumbuhan kelembagaan;

- Pelatihan rumput laut;
- Pelatihan pengolahan ikan;
- Pengembangan sarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan
- Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir;
- Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
- Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
- Kajian potensi lestari sumberdaya ikan;
- Rehabilitasi terumbu karang;

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor perikanan	Persentase produksi perikanan tangkap	%	79
		Persentase produksi perikanan budidaya	%	70
		Persentase cakupan bina kelompok nelayan	%	85
		Persentase jumlah konsumsi ikan	%	75

C. Rencana Anggaran Tahun 2019

Tahun Anggaran 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 7.289.790.800,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.952.118.800,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Delapan Belas Ribu Delapan ratus Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.337.672.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah),

Tabel 2.4
Target Belanja Dinas Perikanan Kab. Buton Utara 2019

Uraian	Target	Prosentase
1	2	3
Belanja Tidak Langsung	Rp1.952.118.800,-	15.00%
Belanja Langsung	Rp. 5.337.672.000,-	85.00%
Jumlah	Rp. 7.289.790.800,-	100 %

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE	KET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor perikanan	Rp. 7.289.790.800,-	97,15 %	APBD
JUMLAH		Rp. 7.289.790.800,-	97,15 %	

Akumulasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara yang dialokasikan untuk program utama dan program penunjang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Program Utama dan Program Penunjang

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
1	2	3	4
1	Program Utama IKU :	4.078.326.000	76.41%
	- Program Pengembangan perikanan tangkap	2.252.992.000	99.01%
	- Program pengembangan budidaya perikanan	1.327.820.000	99.30%
	- Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	-	%
	- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	-	%
	- Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan	438.600.000	96.87%
	- Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	-	%
	- Program Analisis data statistik	58.9334.000	99.74%
2	Program Penunjang IKU :	1.259.326.000	23.59%
	- Program pelayanan administrasi perkantoran	825.149.000	98.92%
	- Program peningkatansarana dan prasarana aparatur	210.000.000	99.64%
	- Program peningkatan disiplin aparatur	139.250.000	99.71%
	- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	71.831.000	64.76%
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.812.000	100%
	- Program perencanaan organisasi perangkat daerah	10.284.000	93.03
	Jumlah Belanja Langsung	5.337.672.000	98.47%

D. Instrumen Pendukung

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas perikanan Kabupaten Buton Utara melakukan sistem one data yang di gagas oleh KKP untuk mendukung penerapan SAKIP.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1.	91 - 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 - 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 - 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 - 65	Rendah	Kuning Muda
5.	50	Sangat Rendah	Merah

**Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010*

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria/Kode
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya pendapatan disektor-sektor Perikanan	Persentase Jumlah Prouksi Perikanan Tangkap	%	80	99.01	123.76	Sangat Baik
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	72	99.74	138.53	Sangat Baik
		Persentase Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	%	90	90.30	100.33	Sangat Baik
		Perentase Jumlah Konsumsi ikan	%	80	96.87	121.09	Sangat Baik

Dari tabel di atas, terdapat Empat indikator dalam satu sasaran strategis. Pada tahun 2019, dari empat indikator yang ditetapkan sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian rata-rata terhadap indikator utama adalah 96.48%. Pencapaian ini masuk kategori sangat baik.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 :

Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor perikanan.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor perikanan terdiri dari empat indikator yaitu

- Persentase jumlah produksi perikanan tangkap.
- Persentase jumlah produksi perikanan budidaya.

- Persentase cakupan bina kelompok nelayan
- Persentase jumlah konsumsi ikan

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase jumlah produksi perikanan tangkap	%	80	99.01	123.76
2.	Persentase jumlah produksi perikanan budidaya	%	72	99.30	138.53
3	Persentase cakupan bina kelompok nelayan	%	90	97.74	109.60
4	Persentase jumlah konsumsi ikan	%	80	96.87	121.09

Persentase capaian ke empat indikator diatas menunjukkan capaian Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara dalam meningkatkan Produksi Perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, cakupan bina kelompok nelayan dan jumlah konsumsi ikan pada tahun 2019 cukup tinggi.

a) Indikator 1: Persentase jumlah produksi perikanan tangkap

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase jumlah produksi perikanan tangkap	79	80	99.01	123.76	90	110.01

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah :

$$\frac{j u \quad h p \quad i l \quad (t_i)}{t_i \quad d \quad h (t_i)} \times 100\%$$

Hasil:

*Jumlah produksi ikan = 7.600

*Jumlah target daerah= 12.100

$$\frac{7.6}{12.1} \times 100\% = 99.0\%$$

Pencapaian realisasi ditahun 2019 cukup tinggi dengan persentase capaian 99.01% hal ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama sebesar 80%, Tahun 2019 jumlah armada penangkapan yang cukup memadai melalui pemberian bantuan kapal perikanan tangkap dibawah 3GT dari alokasi dana DAK tahun 2019 dan Bantuan Alat tangkap dan Alat Bantu Penangkapan yang bersumber dari dana DAU Dinas Perikanan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 99.76% masih lebih Rendah dibanding capaian tahun 2019. Pada tahun2019terjadi penurunan capaian sebesar 0.75%. Untuk pencapaian terhadap akhir renstra baru mencapai 110.01%, alaupun produksi perikanan tangkap menurun, hal ini dikarenakan Iklim yang berubah-ubah dimana ada beberapa daerah penangkapan nelayan tidak bisa melakukan aktifitas penangkapan ikan karena pengaruh gelombang tinggi yang akan berdampak terhadap keselamatan nelayan itu sendiri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indicator 1 sasaran strategis 1 persentase produksi perikanan tangkap melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2019.

b) Indikator 2: Persentase Jumlah produksi perikanan budidaya

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d2019 terhadap 2021(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase jumlah produksi perikanan budidaya	91.56%	72%	99.30%	130.80%	87%	114.14%

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah :

$$\frac{\text{jumlah produksi ikan}}{\text{jumlah target daerah}} \times 100\%$$

Hasil:

*Jumlah produksi ikan = 1.832,12 ton

*Jumlah target daerah = 2.487 ton

$$\frac{1.635,12}{2.4} \times 100\% = 99.3\%$$

Pencapaian realisasi ditahun 2019 cukup tinggi dengan persentase capaian sebesar 99.30% hal ini sudah melampaui target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama sebesar 87% , yang dikarenakan jumlah Sarana dan Prasaran Perikanan Budidaya semakin bertambah, Pengadaan Bibit Rumput laut, Pengadaan Bibit Ikan, pengadaan alat budidaya rumput laut dan Pengadaan Rumah Pengereng Rumput laut yang bersumber dari dana DAU tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (91.56% masih lebih tinggi capaian tahun 2019, jadi ada kenaikan capaian sebesar 7.75%. Untuk pencapaian terhadap akhir renstra sudah Melampaui target yang telah ditetapkan 114.14%

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indicator 2 sasaran strategis 1 persentase produksi perikanan budidaya melampaui target yang ditetapkan.

c) Indikator 3: Persentase cakupan bina kelompok nelayan

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 3

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	Capaian 2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d2019 terhadap 2021(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase jumlah cakupan bina kelompok nelayan	90,72%	90%	97.74%	109.60%	90%	108.60%

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah :

$$\frac{\text{jumlah bina kelompok nelayan tahun 2019}}{\text{jumlah bina kelompok nelayan}} \times 100\%$$

Hasil:

*Jumlah kelompok nelayan yang menerima bantuan pemda = 20 kelompok

*Jumlah kelompok nelayan = 72 kelompok

$$\frac{5}{6} \times 100\% = 97,7\%$$

Pencapaian realisasi ditahun 2019 cukup tinggi dengan persentase capaian 97,7% hal ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama sebesar 90%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (90,72%) capaian tahun 2019 mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan, jadi ada kenaikan capaian sebesar 7,7%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indicator 3 sasaran strategis 1 persentase cakupan bina kelompok nelayan telah melampaui target yang ditetapkan.

d) Indikator 4: Persentase Jumlah konsumsi ikan

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 4

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d2019 terhadap 2021(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase jumlah konsumsi ikan	96,87%	80%	96,87%	121,09%	100%	96,87%

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah :

$$\frac{\text{jumlah konsumsi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Hasil:

*Jumlah konsumsi ikan = 42,77 kg/kap/thn

*Jumlah target daerah = 61,31 kg/kap/thn

$$\frac{42,77}{61,31} \times 100\% = 69,77\%$$

Pencapaian realisasi ditahun 2019 cukup baik dengan persentase capaian 69,77% hal ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (96,87%) dengan capaian tahun 2019 adalah sama, tahun ini mengalami kenaikan sebesar 16,87% dari target renstra yang telah ditetapkan sebesar 80%

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indicator 4 sasaran strategis 1 persentase produksi konsumsi ikan pada tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3.8
Permasalahan Eksternal Yang dihadapi Oleh Dinas Perikanan dalam pencapaian sasaran Strategis dan Solusi Pemecahan Masalah

No	Sasaran Strategis	Masalah	Solusi
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat melalui sektor-sektor Perikanan	Nelayan masih sangat bergantung kepada usaha penangkapan	Melakukan kajian stok potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap untuk mencegah terjadinya over fishing (Penangkapan yang berlebih)
		Minat nelayan untuk melakukan usaha kegiatan budidaya masih sangat rendah	Mendorong minat nelayan untuk melakukan kegiatan budidaya
		Pendampingan terhadap kelompok nelayan yang belum terlaksana dengan baik	Melakukan pendampingan terhadap kelompok nelayan secara intensif dengan mengfungsikan penyuluh perikanan
		Tingkat Konsumsi ikan yang masih rendah	Penyuluhan terkait Gerakan Makan Ikan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam pencapaian sasaran ke-1 adalah:

- Nelayan masih sangat bergantung kepada usaha penangkapan.
- Minat nelayan untuk melakukan usaha kegiatan budidaya masih sangat rendah.
- Pendampingan terhadap kelompok nelayan yang belum terlaksana dengan baik
- Tingkat Konsumsi ikan yang masih rendah

Dalam hal permasalahan di atas. Hal ini mengakibatkan semakin berkurang potensi sumberdaya perikanan tangkap karena nelayan lebih mengutamakan perikanan tangkap, sementara untuk perikanan budidaya belum dikelola secara optimal.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas perikanan dalam menghadapi kendala ini adalah:

- Melakukan kajian stok potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap untuk mencegah terjadinya over fishing (Penangkapan yang berlebihan)
- Mendorong minat nelayan untuk melakukan kegiatan budidaya
- Melakukan pendampingan terhadap kelompok nelayan secara intensif dengan mengfungsikan para penyuluh perikanan.
- Penyuluhan terkait Gerakan Makan Ikan

Strategi yang dilaksanakan untuk capaian kinerja tersebut dilakukan dengan Program perikanan antara lain:

- Program pengembangan perikanan tangkap
- Program pengembangan perikanan budidaya
- Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
- Program optimisasi dan pemasaran produksi perikanan
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			(Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
B	BELANJA LANGSUNG	7,289,790,800	7,082,318,328	207,472,472	97.15
	BELANJA PEGAWAI	2.020.934.800	1.884.975.784	135,959,016	93.27
	BELANJA BARANG DAN JASA	5.172.856.000	5.027.253.344	145,602,656	97.19
	BELANJA MODAL	96.000.000	95.392.000	608.000	99.37
C	PROGRAM DAN KEGIATAN				
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	825.149.000	816.222.094	8.926.906	98.92

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	0.00	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12.900.000	12.900.000	0.00	100.00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	7.500.000	0.00	7.500.000	0.00
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjadinan/operasional	12.000.000	11.986.000	14.000	99.88
5	Penyediaan alat tulis kantor	40.029.000	40.000.000	29.000	99.93
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000.00	11,220.000	780.000	93.50
9	Belanja Makan Minum Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	342.900.000	342.893.094	6.906	100.00
11	Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	29.500.000	29.080.000	420.000	98.58
12	Penyedia Jasa Penunjang Program dan Kegiatan (Atk & P3K)	303.200.000	303.100.000	100.000	99.97
13	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD	59,600,000.00	57,980,000.00	1,620,000.00	97.28
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210,000,000	209,249,000	751,000	99.64
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				0.00
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	6,000,000	5,995,000	5,000	99.92
3	Pengadaan mebeleur	82,000,000	81,400,000	600,000	99.27
4	Pengadaan Komputer			0.00	0.00
5	Pengadaan Alat-Alat Studio			0.00	0.00
6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			0.00	0.00
7	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	122,000,000	121,854,000	146,000	99.88

III	Program peningkatan disiplin aparatur	139,250,000	138,842,000	408,000	99.71
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	8,000,000	7,997,000	3,000	99.96
2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	93,750,000	93,390,000	360,000	99.62
3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	37,500,000	37,455,000	45,000	99.88
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	71,831,000	46,518,100	25,312,900	64.76
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71,831,000	46,518,100	25,312,900	64.76
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	2,812,000	2,812,000	0.00	100.00
1	Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPI SKPD	2,812,000	2,812,000	0.00	100.00
	Program Perencanaan Perangkat daerah	10,284,000	9,567,000	717,000	93.03
	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	2,998,000	2,998,000	0.00	100.00
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	3,940,000	3,238,000	702,000	82.18
3	Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	3,346,000	3,331,000	15,000	99.55
4	Program Perencanaan Perangkat daerah	10,284,000	9,567,000	717,000	93.03
VI	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakatwawasan maritim kepada masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Pembinaan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas)	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,327,820,000	1,318,513,800	9,306,200	99.30
1	Penembangan Sarana Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha Perikanan Budidaya	1,078,620,000	1,071,254,400	7,365,600	99.32
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	249,200,000	247,259,400	1,940,600	99.22
VIII	Program pengembangan perikanan tangkap	2,252,992,000	2,230,691,350	22,300,650	99.01

1	Pengembangan sarana perikanan tangkap	753,500,000	746,765,500	6,734,500	99.11
2	Pengembangan sarana perikanan tangkap DAK	1,499,492,000	1,483,925,850	15,566,150	98.96
3	Pembangunan Pelabuhan Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	475,000,000	460,129,000	14,871,000	96.87
1	Pengembangan sarana dan Prasarana pengolahan, Promosi dan pemasaran produk-produk hasil perikanan	475,000,000	460,129,000	14,871,000	96.87
XI	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Payau dan Air Tawar	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	0.00	0.00	0.00	0.00
XII	Analisis Data Statistik Perikanan	58,934,000	58,780,000	154,000	99.74
1	Validasi Data Statistik Perikanan	44,134,000	44,130,000.00	4,000.00	99.99
	Pengolahan data statistik Kabupaten	14,800,000	14,650,000	150,000	98.99
JUMLAH (Bel. Langsung)		7,289,790,800.	7,082,318,328	207,472,472	97.15

Tabel 3.10

Anggaran dan Presentas Realisasi Belanja Program Utama dan Program Penunjang

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
1	2	3	4
1	Program Utama IKU :	4.078.326.000-	78,78%
	- Program Pengembangan perikanan tangkap	2.252.992.000	42,21%
	- Program pengembangan budidaya perikanan	1,327.820.000	24,88%
	- Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	0.00	0.00%
	- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	0.00	0.00%
	- Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan	438.600.000	8,22%

	- Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	0.00	0.00%
	- Program Analisis data statistik	58.934.000	1.10%
2	Program Penunjang IKU :	1.259.326.000	23.59%
	- Program pelayanan administrasi perkantoran	825.149.000	15.46%
	- Program peningkatansarana dan prasarana aparatur	210.000.000	3.93%
	- Program peningkatan disiplin aparatur	139.250.000	2.61%
	- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	71.831.000	1.35%
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (LAKIP)	2.812.000	0.05%
	- Program perencanaan organisasi perangkat daerah	10.284.000	0.19%
Jumlah Belanja Langsung		5.337.672.000	100 %

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 98.47% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 76.41%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 23.59%.

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor perikanan	Rp. 7.289.790.800	Rp. 7.082.318.328	97.15 %	APBD
JUMLAH		Rp. 7.289.790.800	Rp. 7.082.318.328	97.15 %	

Jika dilihat dari realisasi anggaran terhadap sasaran, maka penyerapan anggaran sebesar 97.15% dari total anggaran Dinas Perikanan, karena Dinas Perikanan hanya memiliki satu sasaran strategis

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi indikator kinerjajadan capaiannya 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
			Target	Capaian	% Capaian	Kriteria/ Kode	Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor perikanan	Persentase jumlah produksi perikanan tangkap	80	99.01	123.76	Sangat Baik	2.252.992.000	2.230.691.350	99.01	24.75
		Persentase jumlah produksi perikanan budidaya	72	99.30	138.53	Sangat Baik	1.327.820.000	857,530,000.00	99.30	38.79
		Persentase cakupan bina kelompok nelayan	90	97.74	109.60	Sangat Baik	58.934.000	58.780.000	97.74	11.86
		Persentase jumlah konsumsi ikan	80	96.87	121.09	Sangat Baik	475,000,000.00	460,129,000.00	96.87	24.22
Rata-Rata Tingkat Capaian					123.24		4,877,792,000.00	4,738,139,000.00	94.73	17.48

Secara realisasi capaian kinerja indikator utama yang dicapai sebesar 138.53% dan 121.09% dibanding dengan realisasi keuangan untuk indikator 2 dan indikator 4 sangat efisien. Untuk indikator 1 dan 3 cukup efisien karena persentase capaian kinerja terhadap target indikator utama sebesar 123,76% dan 109.60% dengan tingkat efisiensi 24.75% dan 11,86%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Dilihat dari pencapaian semua indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang dapat dikategorikan Baik / Berhasil terlihat jelas bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Buto Utara menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara sudah secara tepat melaksanakan Kebijakan dan Program-program yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran terdapat kendala-kendala yang menjadi masalah atau hambatan. Kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut adalah:

1. Penggunaan alat tangkap lampara dasar yang telah dilarang penggunaannya sesuai dengan Permen KP NOMOR 71/PERMEN-KP/2016;
2. Musim yang tidak menentu atau perubahan cuaca yang tidak merata, sehingga kebanyakan nelayan dengan armada kecil tidak melaut;
3. Alat tangkap maupun kapal yang kecil (rata-rata <5 GT), sehingga menyebabkan nelayan tidak mampu beroperasi di wilayah penangkapan yang jauh dari pantai, meskipun secara potensi masih cukup besar area penangkapan ikan;
4. Peningkatan produksi perikanan budidaya belum optimal disebabkan beberapa faktor:
 - Sarana dan prasarana perikanan budidaya belum memadai
5. Terbatasnya sarana produksi pembudidaya
6. Penerapan teknologi tepat guna masih didominasi pola tradisional

Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan tindak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Pemerintah masih mengkaji ulang terhadap PERMEN KP NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 yang diharapkan ada solusi jenis alat tangkap pengganti yang lebih ramah lingkungan;
2. Memberikan bantuan kapal 5 GT keatas kepada kelompok masyarakat nelayan (KUB);
3. Zona tangkapan ikan yang sangat terbatas terkait UU No. 23 Tahun 2014;

4. Pembinaan terhadap masyarakat penangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak terhadap biota-biota yang ada di laut dan sungai
5. Meningkatkan kegiatan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran;
6. Optimalisasi kegiatan pembinaan-pembinaan melalui petugas teknis dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh PPL perikanan terhadap kegiatan perikanan laut dan juga budidaya perikanan darat atau tawar.
7. Penerapan teknologi tepat guna budidaya air payau dan air tawar;
8. Normalisasi saluran tambak dan kolam air tawar;
9. Bantuan bibit ikan air tawar dan bibit ikan air payau;
10. Bantuan sarana dan prasarana terhadap pembudidaya ikan;
11. Peningkatan kapasitas pembudidaya;
12. Peningkatan kapasitas SDM Nelayan Tangkap dan Nelayan Budidaya